

# Politik Indonesia Dalam Konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna

**Adityo Arifianto**

Program Studi Hubungan Internasional, Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Yogyakarta, Indonesia  
adityoarifianto@yahoo.co.id

**ABSTRAK** — Klaim sepihak oleh Cina terkait wilayah blok Natuna merupakan bagian dari wilayahnya membuat hubungan Indonesia dengan Cina memanas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana politik Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan prinsip analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna dipengaruhi oleh Rezim yang berkuasa. Dengan menganut politik luar negeri bebas aktif, Jokowi melakukan 4 pendekatan dalam mensikapi konflik laut Cina Selatan, yaitu geopolitik, pertahanan dan keamanan, hukum dan diplomasi, dan kerjasama ekonomi. Pendekatan Geopolitik ditunjukkan dengan munculnya Doktrin Poros Maritim Dunia. Pertahanan dan keamanan ditunjukkan dengan peningkatan anggaran militer terutama untuk menambah dan mengganti alutsista. Pendekatan Hukum dan Diplomasi telah dilakukan sepanjang jaman. Pendekatan kerjasama ekonomi dilakukan dengan memperbanyak kerjasama dalam bidang ekonomi di kawasan laut Cina Selatan.

**Kata Kunci** — *Konflik, Laut Cina Selatan, Politik.*

## I. PENDAHULUAN

Konflik laut cina selatan merupakan isu keamanan regional yang hingga kini masih belum mencapai titik penyelesaian, serta rawan mengganggu stabilitas kawasan di masa yang akan datang. Sengketa ini diawali oleh klaim sepihak negara China yang memperluas wilayah

perairannya hingga menjangkau wilayah perairan Filipina, Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Konflik ini memerlukan penyelesaian yang bersifat tetap dan mengikat, karena jika tidak potensi perebutan wilayah sangat besar.

Terdapat 3 (tiga) hal mendasar yang menjadi alasan utama mengapa negara-negara yang terlibat dalam konflik laut cina selatan. Pertama, mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi, keanekaragaman hayati dan perikanan serta kekayaan laut lainnya. Kedua, merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia, membuat negara-negara seperti China dan negara-negara di kawasan laut cina selatan, bahkan termasuk Amerika Serikat sangat berkeinginan menguasai kontrol dan pengaruh atas wilayah laut cina selatan yang dinilai sangat strategis dan membawa manfaat ekonomis yang sangat besar bagi suatu negara. [1]

Sumber lain menyebutkan bahwa alasan pokok laut cina selatan diperebutkan diantaranya adalah karena merupakan wilayah strategis, dikelilingi 10 negara. Kemudian kaya akan sumber daya perikanan, merupakan penyumbang 10% dari perikanan global. Dan merupakan potensi migas yang sangat besar, 11 miliar barrel cadangan minyak dan 190 triliun kubik kaki kandungan gas alam. Sedangkan kapal-kapal ikan negara lain selalu incar natuna karena terdapat potensi perikanan 504 ribu ton atau penyumbang 21% hasil tangkapan ikan Indonesia. [2]

Negara-negara kawasan yang terlibat dalam konflik laut cina selatan menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan yaitu Parcel dan Spratly. China misalnya, mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa China atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Parcel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu, kemudian Pemerintah China mengklaim telah mengeluarkan peta yang merinci kedaulatan China atas laut cina selatan pada tahun 1947, yang dikenal dengan istilah “Nine-Dashed Line”.

Sementara itu, Indonesia dan negara Asean lainnya telah mengikuti aturan Zona Ekonomi Eksklusif dan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang sudah baku. Hal ini berarti jika ada suatu negara yang ingin mengklaim suatu wilayah yang termasuk ke dalam ZEE Indonesia maka akan menjadi sebuah masalah yang besar karena akan mengganggu integritas wilayah Indonesia. Indonesia bukan negara yang mengklaim wilayah (*non claimant state*), namun Indonesia terlibat dalam konflik ini. Keterlibatan Indonesia dalam konflik ini karena didasari pada kepentingan nasional untuk turut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia dan kesadaran akan manfaat dari penyelesaian konflik tersebut. [3]

Perkembangan konflik laut cina selatan kini semakin meluas dan berimplikasi kepada permasalahan yang dianggap lebih krusial menyangkut ancaman terhadap kedaulatan teritorial Indonesia. [4] Berbagai upaya dilakukan negara-negara yang terlibat dalam konflik ini. Di antaranya adalah Filipina yang melayangkan Gugatan pada tahun 2013 kepada Mahkamah Arbitrase Internasional. Hasilnya menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum apapun bagi Cina untuk mengklaim hak historis terkait sumber daya di lautan yang terdapat di ‘sembilan garis batas’ di kawasan Laut Cina Selatan. Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag Belanda 2017, klaim Cina di salah satu perairan terluas di dunia tersebut dinyatakan melanggar kedaulatan Filipina.

Masalah konflik Indonesia dengan China terkait dengan masalah laut Cina Selatan, Blok Natuna merupakan konflik yang berkaitan dengan geopolitik, hukum internasional dan masalah kemaritiman. Semuanya bermuara pada kebijakan politik luar negeri Indonesia. Selama ini pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif dengan dasar filosofis dari presiden pertama yaitu Soekarno. Pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo konsep filosofi Trisakti memperoleh legitimasi kembali dengan beberapa kebaruan, termasuk dalam konsep politik luar negeri.

Politik luar merupakan konsep dengan kebutuhan atau kepentingan dari setiap negara yang secara umum dapat dikatakan bahwa politik luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan suatu negara atau komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan negara dan aktor bukan negara di dunia internasional. Politik luar negeri dapat juga sebagai jembatan batas wilayah dalam negeri dan lingkungan internasional. Politik luar negeri wujudnya dapat berupa hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. [5]

Kebijakan politik luar negeri Indonesia sangat penting dalam merespon konflik ini. Baik dengan pendekatan militer maupun diplomasi ataupun pendekatan yang lain misalnya hukum dan sosial ekonomi. Hal ini diantaranya dikarenakan dalam penelitian Ryan Muhammad menjelaskan bahwa skala ancaman yang dihadapi oleh Indonesia terkait isu klaim China atas perairan dan kepulauan Natuna menunjukkan hasil nilai akhir yang berada pada nilai koefisien skala “sedang”. Hal ini berarti potensi ancaman yang dihadapi Indonesia terkait isu klaim China atas perairan dan kepulauan Natuna tergolong sedang bagi Indonesia, dalam hal ini tidak tergolong tinggi dan tidak pula tergolong rendah. [6]

Besar kecilnya ancaman konflik bersenjata dalam konteks negara harus diantisipasi segala kemungkinannya. Kemudian bagaimana dengan politik Indonesia dalam menghadapi konflik laut

china selatan, terutama di Blok Natuna. Politik dalam arti luas merujuk pada politik luar negeri Indonesia dalam mensikapi klaim blok natuna sebagai wilayah Cina. Politik luar negeri tersebut kemudian diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti bidang maritim, pertahanan keamanan, ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Terkait dengan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tema ini dengan tujuan untuk mengetahui politik Indonesia dalam konflik laut cina selatan. Riset ini diharapkan mempunyai kontribusi atau manfaat akademis dan praktis. Secara akademis diharapkan dapat sumbangsi referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti terait dengan isu-isu konflik laut cina selatan dalam perspektif politik Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi sejumlah pihak baik dari Indonesia, maupun dalam lingkup sub negara tersebut berupa lembaga negara yang berwenang memanfaatkan wilayah maritim.

Penelitian terdahulu terkait hal-hal yang berhubungan dengan politik luar negeri dan yang menyangkut konflik laut cina selatan telah banyak dilakukan. Penelitian terkait identitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang diatur dalam UNCLOS 1982 menjadi dasar dari kepentingan Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan Doktrin Poros Maritim Dunia. Doktrin ini mempengaruhi komponen dalam negeri yakni norma, struktur, serta hubungan antara Indonesia dengan negara/pihak lain. Indonesia yang pada masa pemerintahan Jokowi menggunakan strategi pertahanan berbasis defensif aktif, mengutamakan upaya kerjasama terkait sengketa wilayah di pulau-pulau kecil terluar tanpa tindakan agresif. Strategi tersebut juga berarti bahwa sektor ekonomi diposisikan sebagai salah satu pendukung utama bahkan tujuan dari pertahanan, sehingga segala aktifitas pemerintahan harus mengarah pada kesejahteraan rakyat dan peningkatan ekonomi negara. Sehingga dalam kebijakan pertahanan dikenal dengan motto *defense support prosperity*. Pertahanan ditempatkan di pulau-pulau kecil terluar bukan saja untuk menjaga kedaulatan negara melalui operasi militer, tetapi juga membantu menjaga

keamanan terlaksananya kegiatan pemanfaatan sumber daya penunjang perekonomian. [7]

Pada kasus Filipina yang melayangkan Gugatan kepada Mahkamah Arbitrase Internasional. Gugatan Filipina terhadap China mengenai Laut China Selatan melalui Permanent Court of Arbitration (PCA), gugatan yang diajukan Filipina sudah benar dan tidak menyalahi aturan yang ada pada UNCLOS 1982 dan hal ini tidak menyinggung mengenai masalah kedaulatan negara. Putusan arbitrase ini tetap bersifat final dan mengikat meskipun China menyatakan tidak berpartisipasi dan tidak menerima putusan tersebut. Kedua pihak tetap harus menghormati putusan tersebut dan menjalankannya sesuai dengan itikad baik.[8] Penelitian yang lain menjelaskan bahwa klaim Cina atas wilayah Laut Cina Selatan dinyatakan melanggar UNCLOS 1982 oleh putusan Arbitrase di Den Haag tanggal 12 Juli 2016 sehingga secara mutlak Cina tidak memiliki hak atas wilayah Laut Cina Selatan yang diklaimnya. Untuk aktivitas militer di wilayah sengketa, Cina harus menghentikan segala aktivitas disana dan segera menarik kekuatan militernya. Negara lainnya yang turut bersengketa untuk menahan diri sesuai dengan *declaration of conduct* Laut Cina Selatan sampai tercapainya kesepakatan. [9]

Penelitian tentang kebijakan luar Negeri Indonesia yang menyimpulkan bahwa Indonesia masih menggunakan pendekatan faktor geografis sebagai sumber dalam pembuatan kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai usaha Indonesia yang secara terus-menerus berpartisipasi dalam berbagai isu-isu regional yang berpotensi mengganggu kedaulatan Indonesia, misalnya isu konflik di Laut China Selatan dan LautTimur China. Indonesia selalu semangat dan gencar melakukan diplomasi perbatasan untuk mempertahankan perdamaian regional sekaligus territorialnya.[10]

Respon dan kebijakan terhadap klaim sepihak dari Cina ini direspon secara berbeda oleh pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono dan Pemerintahan Joko Widodo. Dalam penelitian ditemukan perbedaan tersebut pada

bahwa pada penelitian Soesilo Bambang Yudoyono respon dan kebijakan cenderung datar, mendorong upaya-upaya perdamaian kawasan dengan perundingan-perundingan dan kerjasama internasional. Sedangkan pemerintahan lebih tegas dengan mempersiapkan antisipasi pertahanan keamanan, kemaritiman serta tetap mengusahakan diplomasi-diplomasi langsung maupun tidak langsung. [11] Penelitian lain dalam konteks 2013 menyimpulkan bahwa kebijakandan strategi pertahanan Indonesia masih menganggap bahwa konflik di Laut Cina Selatan dapat diselesaikan melalui *soft power* dan tidak mengantisipasi penggunaan *hard power* karena akan berimplikasi terhadap kepentingan nasional Indonesia. [12] Meskipun dalam perkembangannya rezim pemerintahan berikutnya mulai memikirkan penguatan pertahanan keamanan di wilayah laut cina selatan, terutama blok natuna.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar atas apa yang telah diupayakan dalam menjaga perdamaian kawasan terkait konflik laut cina selatan. Juga telah mengetahui respon dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dari masa ke masa dan dari sudut pandang berbagai bidang. Penelitian ini akan berangkat dalam sudut pandang politik Indonesia secara umum dalam menghadapi konflik laut cina selatan. Politik yang dimaksud meliputi politik luar negeri Indonesia yang melahirkan berbagai pendekatan dalam penyelesaian laut cina selatan.

Secara teoritis, politik Indonesia dalam konflik laut cina selatan berangkat dari politik luar negeri pemerintah, yang tentu mengalami dinamisasi sesuai dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. Politik bagi suatu negara adalah lanjutan dan refleksi dari politik dalam negeri. Kebijakan politik luar negeri sebagai cerminan politik dalam negeri, sehingga apabila politik domestiknya tidak ada arah yang jelas dan banyak mengandung ketidakpastian di tingkat nasional, akan sulit merefleksikan pada tingkat internasional. [13] Hal ini berarti antara politik dalam negeri dengan luar negeri sangat erat kaitannya. Ciri kas rezim yang berkuasa juga menjadi cerminan politik luar negeri yang

diterapkan. Termasuk politik dalam menghadapi konflik di laut cina selatan.

Politik luar negeri suatu negara selalu mengandung dua unsur yang saling berinteraksi, yaitu unsur keajegan atau tetap dan unsur yang berubah. Unsur tetap biasanya terdiri dari nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat di negara itu serta prinsip-prinsip bernegara yang telah disepakati sejak awal pembentukan negara, sementara unsur perubahan lebih menyangkut pada persoalan yang bersifat strategis, prioritas dan cara-cara memperjuangkan kepentingan nasionalnya. [14] Unsur tetap dalam konteks Indonesia, politik luar negeri mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila yang dipilih karena sila-silanya (5 sila) merupakan pedoman hidup dan aturan bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa bernegara yang ideal dan mencakup segala aspek kehidupan manusia. Landasan operasional yang selalu berubah menyesuaikan kepentingan nasional. Politik internasional bebas aktif dalam arti tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain dan bersedia melakukan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya. [15]

Politik luar negeri dapat didefinisikan sebagai sekumpulan kebijakan yang mempunyai peran dan pengaruh dalam hubungan suatu negara atau pemerintah dengan negara (pemerintah) lainnya sebagai tanggapan terhadap kejadian dan masalah dunia internasional. Atau dengan kata lain, politik luar negeri adalah sintesa perwujudan tujuan dan kemampuan (kapabilitas) nasional. [16] Sehingga meskipun mempunyai unsur tetap, namun ketika unsur perubahan secara operasional dapat berbeda setiap rezim kekuasaan.

William D. Coplin mengidentifikasi ada 4 determinan atau indikator dari politik luar negeri, yaitu konteks internasional, perilaku para pengambil keputusan, kondisi ekonomi dan militer, dan politik dalam negeri. Konteks internasional meliputi geografi, ekonomi, dan politik. Perilaku pengambil keputusan meliputi pihak eksekutif, kementerian dan lembaga negara di suatu pemerintahan. Kemampuan ekonomi dan

militer suatu negara dapat memengaruhi negara tersebut dalam interaksinya dengan negara lain. Politik dalam negeri yang meliputi sistem pemerintahan atau birokrasi yang dibangun dalam suatu pemerintahan serta pengaruhnya terhadap perpolitikan nasional dan internasional.[17]

Rezim yang saat ini berkuasa adalah pemerintahan Joko Widodo, politik luar negerinya masih berprinsip pada politik luar negeri bebas dan aktif berdasarkan filosofi Trisakti Bung Karno (berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial budaya) dalam konteks saat ini. Politik luar negeri pemerintahan Joko Widodo dapat dilihat dari rumusan Renstra Kemenlu 2015-2019. Politik luar negeri RI akan dititikberatkan pada identitas sebagai negara kepulauan dalam diplomasi dan kerja sama internasional. Menguatkan diplomasi *middle power* yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo Pasifik. Arah kebijakan politik luar negeri diluncurkan dengan Doktrin Poros Maritim Dunia (2014), Deklarasi Kerja Sama Negara-Negara Maritim (2014), Perumusan Peran Indonesia dalam G-20, dan Evaluasi Perwakilan Indonesia di Luar Negeri. Meningkatkan pelibatan peran, aspirasi, dan kepentingan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri, serta menata infrastruktur diplomasi. Politik luar negeri ditempatkan dalam integrasi dengan kementerian yang lainnya melalui tiga kata kunci: perdagangan, maritim, dan investasi. Diplomasi ekonomi menjadi basis politik luar negeri dengan orientasi baru, sebuah terminologi baru dalam perjalanan panjang diplomasi RI yang untuk waktu lama didominasi isu-isu keamanan dan politik.[18]

Doktrin poros maritim dunia dalam Renstra Kemenlu terdiri dari Lima pilar utama, yaitu: a) membangun kembali budaya maritim Indonesia; b) menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama; c) memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik,

industri perkapalan, dan wisata maritim; d) menerapkan diplomasi maritim melalui peningkatan kerja sama maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara lain, bukan memisahkan; d) membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggungjawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. [19]

Berdasarkan politik luar negeri pada pemerintahan Jokowi yang sedang berjalan, dengan doktrin poros maritim dunia, maka dapat dilihat bahwa pemerintahan Jokowi mempunyai paling tidak 4 pendekatan dalam mengelola konflik di laut cina selatan blok natuna, yaitu pendekatan geopolitik, pendekatan pertahanan dan keamanan, pendekatan hukum dan diplomasi, dan pendekatan kerjasama ekonomi.

Geopolitik mempelajari bagaimana keputusan politik dapat diambil secara tepat dan strategis dengan mempertimbangkan faktor geografis. Geografis dalam hal ini mengacu pada batas-batas geografis antar negara yang juga berarti batas politis. Geopolitik merupakan daerah irisan antara *political science* dengan *political geography* sehingga geopolitik atau dalam konteks lain hubungan antara geografi dan politik sering juga disebut human geography yang prinsipnya menyangkut hubungan antara *political behavior* dan *psycal features*. Artinya erat hubungan antara perilaku politik negara dan lingkungan geografisnya. [20].

Griffith menyatakan bahwa " *Geopolitics is the study of the influence of geographical factors on state behaviour – how location, climate, natural resources, population, and physical terrain determine a state's foreign policy options and its position in the hierarchy of states*" [21]. Geopolitik secara tradisional menunjukkan hubungan sebab akibat antara kekuatan politik dan ruang geografis. Terminologi ini merupakan formulasi khusus yang berhubungan antara kepentingan strategis relatif dengan pentingnya potensi geografis dalam perspektif dunia internasional. Fokus utama teori

geopolitik berhubungan dengan korelasiantara kekuatan dalam bidang politik, unsur wilayah geografis inti dari perspektif internasional, dan hubungan antara kapabilitas laut dan darat yang dimiliki oleh suatu negara. Pendekatan geopolitik dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan terkait kebijakan luar negerinya baik dalam konteks kerjasama ataupun penyelesaian hubungan konfliktual. Geopolitik merupakan peta bagi negara untuk bermain dalam politik internasional baik dalam skala lokal, regional maupun global. Berdasarkan teori geopolitik dapat dilihat visi kedepan tentang sesuatu aktivitas yang menyangkut dengan kepentingan nasional. Doktrin Poros Maritim Dunia itu sendiri termasuk dalam pendekatan geopolitik pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan visi ke depan.

Pendekatan pertahanan dan keamanan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendekatan kekuatan militer yang digunakan untuk menjaga kedaulatan negara, termasuk teritorial maritim. Dalam konteks konflik laut cina selatan blok natuna, pendekatan militer bukan merupakan pendekatan utama namun merupakan langkah antisipasi yang di siapkan untuk kondisi-kondisi yang diperlukan. Teori yang relevan dengan pembahasan masalah pertahanan dan keamanan adalah teori strategi keamanan.Strategi dirancang berdasarkan pada rasionalitas para pembuat keputusan, bukan pada pertimbangan moral, keyakinan atau hal-hal emosional lainnya. Berpedoman strategi para pembuat kebijakan dalam usaha mencapai kepentingan nasional dan mencegah timbulnya masalah dan hambatan atas kepentingan tersebut. [22].

Konsep keamanan dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mempertahankan diri (survival)dalam menghadapi ancaman yang nyata (*existential threat*). Keberlangsungan hidup suatu negara adalah bagaimana memproteksi dan memproyeksikan kedaulatan wilayah dan bagaimana mengembangkan serta mempertahankan identitasnya sebagai suatu bangsa.[23]. Berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif dengan doktrin poros maritim dunia, Indonesia harus mampu menghadapi konflik yang

terjadi di Laut Cina Selatan dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip politik luar negeri yang dianut. [24].Pertahanan dan keamanan yang dimaksud dalam konteks konflik laut cina selatan adalah terkait dengan ketersediaan alutsista, personil, pangkalan militer, strategi dan kebijakan pendanaan.

Pendekatan Hukum dan diplomasi merupakan pendekatan yang mengedepankan pemahaman hukum-hukum internasional yang mendasari hubungan kerjasama, wilayah perbatasan dan upaya perdamaian. Diplomasi dapat diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan. Selain itu diplomasi juga dikatakan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan politik luar negeri masing-masing negara. Diplomasi merupakan bagian penting sebagai solusi penyelesaian konflik secara damai. Diplomasi dilakukan untuk mencapai tujuan atau kepentingan nasional suatu negara. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, dapat juga terjadi pada situasi perang atau konflik bersenjata karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus di tengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung. [25]. Diplomasi dalam konteks konflik laut Cina Selatan dapat dilakukan terhadap sesama negara ASEAN maupun dengan negara-negara di luar ASEAN. Bahkan diforum-forum internasional lain yang dapat membantu terbentuknya perdamaian regional. Diplomasi dibangun diantaranya dengan membangun hubungan bilateral dan multilateral.

Pendekatan kerjasama ekonomi merupakan pendekatan pembangunan perekonomian bersama dengan prinsip yang saling menguntungkan. Pendekatan ekonomi diharapkan dapat mencairkan ketegangan regional. Pendekatan penyelesaian konflik dengan paradigma pembangunan kerjasama ekonomi merupakan paradigma bauru, karena selama ini seringkali dilakukan dengan pendekatan politik dan keamanan. Kerjasama ekonomi yang

dimaksud juga melibatkan masyarakat dalam negeri termasuk diwilayah yang rawan terjadi konflik.

Dengan empat pendekatan tersebut, politik Indonesia dalam konflik laut Cina selatan blok Natuna diharapkan dapat disikapi dengan bijaksana, strategis dan dalam kerangka terjaminnya kedaulatan negara tanpa ada konflik terbuka dengan pihak manapun.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu tipe penelitian yang berusaha membuat gambaran fenomena atau kejadian tertentu dengan apa adanya. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadioleh subjek penelitian secara utuh dan menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari subyek langsung yang didapat melalui observasi dan wawancara dengan subyek-subyek hukum. Data Sekunder akan lebih menitik beratkan pada telaah pustaka atau *library research* yang akan di peroleh dari berbagai buku, dokumen, jurnal, koran, majalah, website dan literatur lainya yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, serta studi pustaka.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta- fakta yang ada kemudian dihubungkan antar fakta fakta, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Seperti yang di katakan Stuart. A.Schlegel bahwa model analisis kualitatif dapat berbentuk data → analisis data dan hipotesa dari data yang di dapatkan → teori yang dipakai [26].

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini terfokus pada tema penelitian yaitu terkait dengan tujuan penelitian yaitu politik Indonesia terkait dengan konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna. Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan politik Indonesia dalam konflik laut Cina selatan tidak dapat lepas dari rezim pemerintahan yang sedang berkuasa, yaitu pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Berangkat dari konsep politik Jokowi pada saat kampanye pemilihan presiden dan kemudian dijadikan sebagai dasar visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodoatau yang dikenal dengan Nawacitra pemerintahan Joko Widodo. Jokowi dalam Nawacita poin pertama menegaskan misinya akan menghadirkan negara dalam rangka melindungi bangsa (termasuk rakyatnya) dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas dan aktif, keamanan nasional yang terpercaya, pembangunan pertahanan dilandasi kepentingan nasional, dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Presiden Jokowi menggunakan politik luar negeri sebagai upaya dalam meningkatkan ketahanan nasional dan mewujudkan agenda pembangunan yang direncanakan. Hal ini didasari pemikiran bahwa Indonesia akan dianggap oleh dunia dengan tiga syarat, yaitu demokrasi yang terus berkembang, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, serta upaya membina hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Pada awalnya prioritas pertama adalah terkait politik dalam negeri, karena 2 diantara 3 urusan tersebut masuk dalam urusan domestik. Kemudian pemerintah saat ini telah mulai memprioritaskan kebijakan luar negeri dalam rangkamendukung agenda pembangunan nasional seperti diplomasi ekonomi untuk meningkatkan investasi masuk, penguatan integritas teritorial melalui berbagai diplomasi, dan perlindungan WNI yang ada diluar negeri melalui pendekatan hukum dan diplomasi serta hubungan diplomatik. Praktik demokrasi ekonomi yang demikian ini menjadi basis politik luar negeri pada era Jokowi ditunjukkan dengan partisipasinya dalam forum-forum internasional seperti APEC, KTT ASEAN,

dan KTT G-20 serta forum lainnya. Presiden menggunakan forum-forum tersebut untuk menarik investasi asing datang ke Indonesia, membuka pasar luar negeri yang luas dan mengundang lebih banyak turis asing masuk berwisata ke Tanah Air. Tidak terkecuali posisi Indonesia juga sering menjadi penengah dan pendorong terbentuknya resolusi konflik yang terjadi, termasuk mendorong terwujudnya perdamaian di regional ASEAN terkait dengan konflik laut cina selatan.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif berlandaskan pada ideologi Pancasila dan mempunyai filosofi Trisakti berdasarkan pemikiran Soekarno. Politik luar negeri Indonesia dalam konflik laut Cina selatan terutama Blok Natuna berdasarkan penelitian, dapat dikelompokkan ke dalam 4 pendekatan, yaitu pendekatan geopolitik, pendekatan pertahanan dan keamanan, pendekatan hukum dan diplomasi, dan pendekatan kerjasama ekonomi.

Pendekatan Geopolitik yang dilakukan pemerintah Jokowi dilakukan dengan konsep dasar hubungan politik dengan geografis Indonesia. Berdasarkan wilayah maritim yang sangat luas, bentuk negara kepulauan dan segala potensi sumberdaya yang tersedia, maka lahirlah doktrin poros maritim dunia sebagai kebijakan geopolitik presiden Jokowi. Indonesia mulaimenyadari bahwa saat ini sebuah transformasi besar sedang terjadi, yaitu pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur. Negara-negara Asia sedang bangkit perekonomiannya dan perkembangan teknologinya. Jalur laut Asia merupakan jalur strategis yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, yang merupakan jalur penting bagi lalu lintas perdagangan dunia. Indonesia tepat berada di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik secara geografis, geopolitik, maupun geo-ekonomi. Indonesia sebagai negara maritim telah menegaskan sebagai Poros Maritim Dunia, sebagai kekuatan yang berada di antara dua samudera: Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Ide Poros Maritim Dunia dalam Renstra Kementerian Luar Negeriterdiri dari lima elemen. Elemen pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, hal ini telah dimulai dengan paradigma pembangunan maritim ditingkatkan, bukan hanya paradigma pembangunan darat. Dalam bergagai bidang paradigma pembangunan laut telah dilakukan dan dimulai dari struktur pemerintah serta kesiapan SDM nya. Pelaut Indonesia (SDM) menjadi bagian terpenting karena sebagai subyek yang mampu menggerakkan apa saja dan merupakan potensial yang wajib dilibatkan sejak awal hingga perencanaan. Indonesia perlu menyiapkan keahlian di berbagai bidang kelautan, mulai dari yang bersifat teknis, teknologi, sampai ahli-ahli strategi dan hukum laut internasional. Pada level yang lebih strategis, bangsa Indonesia juga perlu memperkuat kesadaran lingkungan maritim (*Maritime Domain Awareness/MDA*).

Elemen kedua, yaitu menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan laut melalui pengembangan industri perikanan. Hal ini diwujudkan dengan pemberantasan ilegal fishing oleh kementerian kelautan dan perikanan (KKP), pemberdayaan nelayan, konservasi kawasan laut serta program-program lain yang berada di kementerian yang lain.

Elemen ketiga, mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Pembangunan tol laut sudah mulai diwujudkan. Tol Laut merupakan sistem pengiriman atau distribusi barang menggunakan kapal-kapal kargo besar yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Pengadaan kapal-kapal dan pelabuhan-pelabuhan sudah mulai diwujudkan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung konektivitas orang dan barang ke seluruh Indonesia, sehingga kemajuan dapat merata.

Elemen keempat, melakukan diplomasi maritim yang bertujuan menghilangkan berbagai sumber konflik di laut. Hal ini telah dilakukan terkait dengan penyelesaian konflik laut cina



selatan blok natuna. Selain itu Indonesia juga memprakarsai berbagai pertemuan untuk menciptakan kawasan ASEAN yang damai, aman, stabil dan nyaman.

Elemen kelima, membangun kekuatan dan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta menjaga keselamatan, pelayaran, dan keamanan maritim. Hal ini dilakukan dengan memperkuat aparat keamanan dan pertahanan laut, baik melalui jalur militer atau polisi laut atau pengamanan sipil melalui kementerian kelautan dan perikanan yang mengawasi keamanan wilayah dari pencurian ikan. Kekuatan militer digunakan untuk menjaga kedaulatan negara dan sebagaiantisipasi hal-hal yang tidak dapat ditolehir.

Pendekatan pertahanan dan keamanan dalam politik luar negeri Indonesia atas konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna bukan merupakan opsi yang utama, namun sebagai negara poros maritim dunia, harus mampu menunjukkan kekuatan militernya dalam menjaga kedaulatan wilayah. Secara juridis formal, Indonesia sudah sangat kuat atas kepemilikan wilayah lautnya, namun mempunyai konsekuensi yang tidak ringan, yaitu Indonesia harus mampu menjaga laut dan kekayaannya dari negara lain. Jika tidak mampu menjaganya, maka negara asing semakin leluasa untuk mencuri dan mengambil alih kekayaan laut di wilayah Indonesia. Jokowi meningkatkan anggaran militer Indonesia secara bertahap dengan tujuan utama untuk memperbarui alutsista yang ada serta menambah alutsista yang kurang. Pembangunan pangkalan militer juga diperlukan pada batas-batas negara serta wilayah-wilayah yang rentan terjadi konflik, kejahatan serta gangguan keamanan dan ketertiban yang mengancam wilayah dan warga Indonesia.

Tujuan pendekatan pertahanan dan keamanan adadak tercapainya sea power, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Mahan, seorang laksamana terkemuka Angkatan Laut Amerika Serikat (AS). Mahan mendeskripsikan sea power sebagai kemampuan negara untuk melindungi kepentingan politik, ekonomi, dan militernya dengan menggunakan laut. Empat prinsip yang

terkandung didalam sea power yaitu *naval power, ocean science, ocean industry, and ocean commerce*. Menurut Corbett, sea power bukan hanya membahas tentang apa yang bisa negara lakukan di laut, tetapi juga mencakup efektifitas tindakan suatu negara di laut dan dapat memberikan dampak baik bagi aspek daratan. [27].

Pendekatan hukum dan diplomasi dalam konflik laut cina selatan telah dilakukan Indonesia sejak lama, sejak presiden pertama sampai presiden ketujuh, presiden Jokowi dan sampai saat ini Indonesia aktif melakukan diplomasi untuk mewujudkan kawasan teritorial yang kondusif dan damai. Penyelesaian konflik yang terjadi harus menggunakan metode penyelesaian secara damai, yaitu diplomasi yang *win-win solution*. Diplomasi *soft power asimetr*is perlu diterapkan baik negara maupun organisasi sehingga mampu menjadi alternatif penyelesaian konflik dengan catatan *win-win solution* dapat dirasakan secara langsung bagi mereka yang bersengketa. Penyelesaian dengan jalan damai telah lama diupayakan dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan, namun belum mendapatkan hasil yang memuaskan banyak pihak. Seperti yang dilakukan pada first track diplomacy, melalui pendekatan regional oleh ASEAN telah disepakati Deklarasi Tata Prilaku Pihak-Pihak di Laut Cina Selatan (*Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*) yang dirasa cukup berhasil dalam mengelola konflik, meskipun deklarasi ini belum mampu menyelesaikan sengketa secara permanen.

Indonesia sudah lama dikenal sebagai actor kunci dalam perundingan dan lahirnya berbagai norma ASEAN Waydan pembangunan ASEAN seperti pembentukan ASEAN *Political Security Community* dan *Bali democracy Forum*. Indonesia juga merupakan juru damai atau mediator terpercaya dalam berbagai konflik regional yang terjadi, seperti konflik Thailand – Kamboja dan konflik Filipina dan Myanmar. [28].

Pendekatan kerjasama ekonomiyang dimaksud dalam konteks penyelesaian konflik laut cina selatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kerjasama ekonomi untuk

mengurangi ketegangan terhadap konflik yang terjadi. Pendekatan ekonomi dilakukan sebagai paradigma baru. Hal ini telah dilakukan pemerintahan Jokowi, setelah ada klaim sepihak dari Cina atas blok Natuna, Jokowi bertemu dengan Cina untuk membicarakan kerjasama ekonomi dan hasilnya terdapat tiga kesepakatan. Pertama adalah upaya meningkatkan perdagangan dengan mempersempit gap defisit perdagangan Indonesia dengan Cina. Kedua adalah mengenai investasi, dimana perlunya peningkatan investasi kedua negara, terutama di bidang manufaktur dan infrastruktur. Ketiga, mengenai pariwisata, dimana masyarakat Cina akan didorong untuk berkunjung ke Indonesia.[29]. Bukan hanya itu, pada tahun 2017 yang lalu Indonesia menjadi tuan rumah lokakarya pengelolaan potensi konflik China Selatan pada tanggal 16-17 November 2017 di Jakarta. Workshop diikuti oleh 70 peserta yang berasal dari Brunei Darussalam, RRT, Filipina, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Vietnam dan China Taipei. Lokakarya ini dapat mendorong tercapainya *code of conduct* atau etika berperilaku di Laut China Selatan. Lokakarya tersebut menghasilkan 8 proyek kerjasama antar negara di kawasan Laut Cina Selatan. Hal ini menjadi langkah awal untuk menciptakan iklim yang kondusif dan menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan kerjasama ekonomi. [30].

#### IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah politik Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna tidak dapat lepas dari rezim pemerintahan yang sedang berkuasa, yaitu pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi dalam Nawacita poin pertama menegaskan misinya akan menghadirkan negara dalam rangka melindungi bangsa (termasuk rakyatnya) dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas dan aktif, keamanan nasional yang terpercaya, pembangunan pertahanan dilandasi kepentingan nasional, dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif berlandaskan pada ideologi Pancasila dan mempunyai filosofi Trisakti berdasarkan pemikiran Soekarno. Politik luar negeri Indonesia dalam konflik laut Cina selatan terutama Blok Natuna berdasarkan penelitian, dapat dikelompokkan ke dalam 4 pendekatan, yaitu pendekatan geopolitik, pendekatan pertahanan dan keamanan, pendekatan hukum dan diplomasi, dan pendekatan kerjasama ekonomi.

Pendekatan Geopolitik yang dilakukan pemerintah Jokowi dilakukan dengan konsep dasar hubungan politik dengan geografis Indonesia. Indonesia tepat berada di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik secara geografis, geopolitik, maupun geoekonomi. Indonesia sebagai negara maritim telah menegaskan sebagai Poros Maritim Dunia, sebagai kekuatan yang berada di antara dua samudera: Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Doktrin Poros maritim Dunia terdiri dari lima elemen. Elemen pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Elemen kedua, yaitu menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan laut melalui pengembangan industri perikanan. Elemen ketiga, mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Elemen keempat, melakukan diplomasi maritim yang bertujuan menghilangkan berbagai sumber konflik di laut. Elemen kelima, membangun kekuatan dan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta menjaga keselamatan, pelayaran, dan keamanan maritim.

Pendekatan pertahanan dan keamanan dalam politik luar negeri Indonesia atas konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna bukan merupakan opsi yang utama, namun sebagai negara poros maritim dunia, harus mampu menunjukkan kekuatan militernya dalam menjaga kedaulatan wilayah. Jokowi meningkatkan anggaran militer Indonesia secara bertahap dengan tujuan utama untuk memperbarui alutsista yang ada serta menambah alutsista yang kurang. Pembangunan

pangkalan militer juga diperlukan pada batas-batas negara serta wilayah-wilayah yang rentan terjadi konflik, kejahatan serta gangguan keamanan dan ketertiban yang mengancam wilayah dan warga Indonesia.

Pendekatan hukum dan diplomasi dalam konflik laut cina selatan telah dilakukan Indonesia sejak lama, sejak presiden pertama sampai presiden ketujuh, presiden Jokowi dan sampai saat ini Indonesia aktif melakukan diplomasi untuk mewujudkan kawasan teritorial yang kondusif dan damai. Indonesia sudah lama dikenal sebagai actor kunci dalam perundingan dan lahirnya berbagai norma ASEAN Waydan pembangunan ASEAN seperti pembentukan ASEAN *Political Security Community* dan *Bali democracy Forum*. Indonesia juga merupakan juru damai atau mediator terpercaya dalam berbagai konflik regional yang terjadi, seperti konflik Thailand –Kamboja dan konflik Filipina dan Myanmar.

Pendekatan kerjasama ekonomi yang dimaksud dalam konteks penyelesaian konflik laut cina selatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kerjasama ekonomi untuk mengurangi ketegangan terhadap konflik yang terjadi. Pendekatan ekonomi dilakukan sebagai paradigma baru. Hal ini telah dilakukan pemerintahan Jokowi, setelah ada klaim sepihak dari Cina atas blok Natuna, Jokowi bertemu dengan Cina untuk membicarakan kerjasama ekonomi. Pendekatan-pendekatan tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, karena dapat saling mendukung dan menguatkan dalam upaya politik luar negeri terkait penyelesaian konflik laut cina selatan, terutama Blok Natuna.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nainggolan, P. P. 2013. *Konflik Laut Cina Selatan dan Implikasinya Terhadap Kawasan*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia.
- [2] Katadata.com. 13/7/2016. <https://katadata.co.id/infografik/2016/07/13/kenapa-laut-cina-selatan-diperebutkan> (diakses 12 Desember 2017, pukul 21: 26 WIB)
- [3] Tidwell, A. C. 1998. *Conflict Resolved?: A Critical Assessment of Conflict Resolution*. London and New York: Continuum.
- [4] NBC Indonesia. (2015, 10 16). Klaim Wilayah Natuna, Cina Kerahkan Armada Tempur Besar-besaran. <http://www.nbcindonesia.com/2015/10/klaim-wilayah-natuna-cina-kerahkan.html> (diakses 13 Desember 2017, puykul 19.00 WIB)
- [5] Hara. A. E. (2011). *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri dari Realisme sampai Konstruktivisme..* Bandung: Penerbit Nuansa.
- [6] Muhammad, Ryan. 2016. Analisis Ancaman Terhadap Isu Klaim China Atas Kepulauan Natuna Terkait Konflik Laut China Selatan Melalui Metode Analisis Intelijen “Hank Pruncun”. <https://lingstra.org/2016/04/analisis-ancaman-terhadap-isu-klaim-china-atas-kepulauan-natuna-terkait-konflik-laut-china-selatan-melalui-metode-analisis-intelijen-hank-pruncun/> (diakses 12 desember 2017, pukul 21.20 WIB)
- [7] Asana, R., Suwartiningsih, S. and Nugroho, A.B.H., 2017. Kebijakan Pertahanan Indonesia Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Pada Masa Pemerintahan Jokowi. *Cakrawala*, 6(1), pp.35-58.
- [8] Trihastuti, N., Susetyorini, P. and Hanifah, M., 2017. Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Permanent Court of Arbitration. *Diponegoro Law Review*, 6(1), pp.1-9.
- [9] Al-Attar, F.S., Warno, N.D. and Hardiwinoto, S., 2017. Tinjauan Yuridis Penempatan Kekuatan Militer Di Wilayah Sengketa Internasional (Studi Kasus Laut Cina Selatan). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), pp.1-13.
- [10] Haryanto, A., 2015. Faktor Geografis dan Konsepsi Peran Nasional sebagai Sumber Politik Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(2), pp.136-147
- [11] Shabrina, N.O., 2017. Perubahan Respon Indonesia Terhadap Klaim Nine-Dash Line Tiongkok Yang Melewati Perairan Natuna. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(2), pp.133-146.

- [12] Prabowo, E.E., 2013. Kebijakan Dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik Di Laut Cina Selatan). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 19(3), pp.118-129.
- [13] Wuryandari, G. (ed). 2011. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- [14] Sriyono, A. (ed). 2004. *Politik Luar Negeri Indonesia dalam zaman yang Berubah, Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [15] Alami, Atiqah Nur, 2008. Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia” dalam Ganewati Wuryandari (ed.), 2008. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Jakarta: P2P LIPI dan Pustaka Pelajar.
- [16] Rudy. T. M. 1993. *Teori, Etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: Angkasa.
- [17] Coplin. William D. 1992. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru.
- [18] Haryono, E. 17 – 10-2017. *Politik luar negeri tiga tahun pemerintahan Jokowi*. <http://mediaindonesia.com/news/read/127568/politik-luar-negeri-tiga-tahun-pemerintahan-jokowi/2017-10-17> (diakses 12 Desember 2017, Pukul 19.00 WIB)
- [19] Kemenlu. 2014. Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri tahun 2014 – 2019.
- [20] Keliat, M. 2009, Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol 13, No.1 Juli 2009, h.113.
- [21] Griffiths, M. dan Terry O’Callghan, 2002, *International Relations :the key concepts*, Routledge: New York, hlm.120
- [22] Mas’oed, Mochtar. 1989. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Pusat antar Universitas-Studi Sosial UGM. hlm, 90
- [23] Barry buzan, 2009. *Security: A New Framework for Analysis dalam Wuryandari, G. Keamanan di Perbatasan Indonesia–Timur Leste, Sumber Ancaman & Kebijakan Pengelolaannya*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar. hlm.27
- [24] Genewati W. *Ibid.* , hlm 30.
- [25] S.L , Roy. 1995, *Diplomasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada. hlm. 35.
- [26] Schlegel, S. A..1986, *Penelitian Graunded Dalam Ilmu-Ilmu Sosial*, Surakarta : FISIPOL UNS. Hal.13.
- [27] Till, Geoffrey. 2004. *Seapower: A Guide for Twenty-First Century*. New York: Routledge.
- [28] BPPK KEMENLU, 2015. *Laporan Akhir Riset, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM 2015*, hal 6.
- [29] Asmara, Tia. 02-09-2016. Indonesia dan China Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/indonesia-china-09022016143532.html> (diakses tanggal 21 Desember 2017)
- [30] Ghozali, P. 16 November 2017. Indonesia dorong kerja sama selesaikan konflik laut cina selatan. <https://aa.com.tr/id/headline-hari/indonesia-dorong-kerja-sama-selesaikan-konflik-laut-china-selatan-1966695> (diakses tanggal 12 Desember 2017, pukul 23.00 WIB)